

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

RENJA ini selain sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggung jawabkan baik dilapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan RENJA ini.

Malili, 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19650406 198603 1 017

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>    TAHUN LALU</b> .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (harus ada penyesuaian terkait program dan kegiatan).....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah .....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
<b>BAB IV    RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	59
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	63

**DAFTAR TABEL**

1. Tabel 01 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA perangkat daerah dan pencapaian RENSTRA perangkat daerah s/d tahun 2019 .....	11
2. Tabel 02 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur .....	20
3. Tabel 03 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 .....	26
4. Tabel 04 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 .....	42
5. Tabel 05 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 .....	48
6. Tabel 06 Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur .....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada akhir Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dimana penyusunan RENJA tersebut merupakan amanat dari Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

RENJA Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Luwu Timur dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selanjutnya RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RENJA Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rancangan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur TA. 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun

- 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kab.Luwu Timur 2005-2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
  23. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Tahun 2017;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
  26. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
  27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019);
  28. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dapat menerangkan perencanaan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2022.

Penyusunan RENJA Perubahan ini juga dimaksudkan untuk menentukan tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

**BAB I      PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

**BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

**BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

**BAB IV    RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan RENJA dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

**BAB V     PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah**

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan RENSTRA yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 9 program dan 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.275.724.384,- atau sebesar 96,46% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.542.685.624,- yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 7.504.175.624,- dengan realisasi Rp. 7.237.444.384,- atau 96,45% dan belanja modal sebesar Rp. 38.510.000,- dengan realisasi Rp. 38.280.000,- atau 99,40%.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Bapedalda berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup sehingga ada perubahan terkait program persampahan yang dulunya merupakan tugas dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman akan tetapi sejak tahun 2018 menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup.

Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terdiri dari :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan
9. Program Pengelolaan Persampahan

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

TABEL T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021 (tahun n- 1)	Tingkat capaian realisasi target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	3	8	6	6	100	3	17	567

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (Dokumen)	0	1	1	1	100	0	2	-
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	0	0	0	0	2	2	100
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	0	0	0	0	2	2	100
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	0	0	0	0	10	10	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>							
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan ( Orang)	26	0	0	0	0	26	26	7
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	18	2	2	2	100	18	22	6
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>							
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat	4	0	0	0	0	4	4	1

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

		waktu (Dokumen)								
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Dokumen)	12	0	0	0	0	12	12	3
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	0	0	0	0	2	2	1
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	4	6	3	3	100	4	13	3
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	3	3	3	3	100	3	9	2
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12	0	0	0	0	12	12	3
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	7	6	6	100	5	18	5

## Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan (eksamper)	1440	1825	1440	1440	100	1440	4705	1,176
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	196	700	460	460	100	196	1356	339
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	0	44	47	47	100	0	91	23
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	171	50	41	41	100	171	262	66
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)	0	264	285	285	100	0	549	137
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	2	2	4	0	0	0	2	1
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	12	0	0	0	0	0	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	0	0	0	0	2	2	1
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (unit)	0	8	14	0	0	0	8	2

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	1000	3000	3000	3000	100	1000	7000	1,750
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	36	36	36	36	100	36	108	27
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	4	0	0	0	0	3	3	1
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan (orang)	0	2	2	2	100	0	4	1
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis yang terbayarkan (orang)	0	13	15	14	93.33	0	27	7
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100%</b>							
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	8	8	8	100	8	24	6

## Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	32	0	0	0	#DIV/0!	32	32	8
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2	2	2	2	100	2	6	2
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (unit)	0	32	32	32	100	0	64	16
	<b>Program Penataan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Dokumen Lingkungan Yang dihasilkan</b>	<b>0%</b>	100	0	0	0	0	0	0
	Penilaian Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang dinilai (dokumen)	0	7	20	20	100	0	27	7
	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Fdaya Dukung dan Daya Tampung yang dihasilkan (dokumen)	0	1	0	0	0	0	1	0
	Penyusunan Indeks zKualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen IKLH yang dihasilkan (dokumen)	0	1	1	1	100	0	2	1
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>1%</b>							
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)</b>	4	0	0	0	0	4	4	100
	Peningkatan Kinerja laboratorium	Jumlah Akreditasi Laboratorium (parameter)	0	5	176	176	100	0	181	45

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Sarana dan Prasarana yang iadakan (jenis)	0	6	3	3	100	0	9	2
	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan (dokumen)	4	0	0	0	0	4	4	1
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan (laporan)	176	0	0	0	0	176	176	44
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Luas lahan yang direhabilitasi (Ha)</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi (Ha)	37	37	37	37	100	37	111	28
	kegiatan Sungai dan Danau Bersih	Jumlah Sungai dan Danau yang dibersihkan (sungai/danau)	0	3	3	3	100	0	6	2
	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>Terciptanya ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan (Dokumen)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah RTH yang dipelihara (RTH)	5	5	5	5	100	5	15	4

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	(usaha)Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30	0	0	0	0	30	30	8
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi (usaha)	30	0	0	0	0	30	30	8
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi (usaha)	30	0	0	0	0	30	30	8
	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi (usaha)	0	8	20	20	100	0	28	7
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (usaha/kegiatan)</b>	<b>50%</b>							
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Pesentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi (Usaha/ Kegiatan)	22	20	20	20	100	50	90	23
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi (Usaha/	10	0			0	10	10	3

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	lingkungan dan/ atau izin PPLH	Kegiatan)								
	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi (Usaha/ Kegiatan)	30	50	50	50	100	30	130	33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	(Usaha/ Kegiatan)Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi (Usaha/ Kegiatan)	2	0	0	0	0	2	2	1
	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional (MHA)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah MHA yang terdata (MHA)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA (MHA)	3	3	3	3	100	3	9	2

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH									
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup (Penghargaan)</b>	<b>1</b>							
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penghargaan yang diterima (Penghargaan)</b>	<b>1</b>							
	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina (Sekolah Adiwiyata)	0	13	17	17	100	0	30	8
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan yang diterima ( Penghargaan)	1	1	1	0	0	1	2	1
	<b>Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>50%</b>							

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan (Masalah)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan (Masalah)	2	2	2	2	100	2	6	2
	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
	<b>Pengelolaan sampah</b>	<b>Persentase sampah yang terkelola</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana yang dipelihara (Unit)	0	58	58	58	100	0	116	29
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga persampahan (orang)	129	125	129	129	100	21500	21754	5,439
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara (jenis)	13	22	0	0	0	13	35	9

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022*

---

---

5	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina (Bank Sampah)	127	100	100	100	100	127	327	82
---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dibidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Lingkungan Hidup; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam RENSTRA Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KAB. LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>		<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1	Indeks kualitas air	0.376	61.25 %	46.25%	50.00%	53.80%	57.50%	27.00	27.50	46.25%	50%	53.80%	89.19%	80.69	66.52	28.00	28.20	
2	Indeks kualitas udara	0.405	53.16 %	50.08%	50.90%	51.62%	52.39%	29.50	29.55	50.08%	50.90%	51.60%	98.4	97.62	94.27	29.60	29.65	
3	Indeks tutupan lahan	0.219	70.24 %	70.24%	70.24%	70.24%	70.24%	30.50	30.50	70.24%	70.24%	70.24	76.48	76.48	75.45	30.50	30.50	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	80	30	50	70	75	60.55	60.56	10.97	72.65	60.54	64.78	64.78		60.57	60.58	

Keterangan:

Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota =  $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air dan Udara mengacu pada baku mutu/standar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup sesuai tupoksinya melaksanakan pelayanan publik terdiri dari;

1. Pelayanan perizinan lingkungan dan perizinan LB3/Medis

Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi terkait izin lingkungan dan rekomendasi perizinan LB3/Medis serta melakukan pengawasan terkait dokumen lingkungan.

2. Pelayanan kebersihan dan persampahan

Pelayanan Kebersihan dan persampahan telah dikelola oleh UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan sejak Tahun 2019 dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak 129 orang terdiri dari : 3 Pengawas, 2 operator alat berat, 1 operator pencacah sampah, 16 sopir truk sampah, 10 operator pengemudi motor sampah, 34 kru mobil, 1 satpam TPA Ussu, 3 Pengelola TPA Ussu, 10 Tenaga pembabat rumput, 15 tenaga pembersih drainase, 33 tenaga kebersihan dan pertamanan, 1 tenaga administrasi persampahan.

3. Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Pelayanan laboratorium lingkungan dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sejak Tahun 2019, dimana Laboratorium Lingkungan ini dapat memeriksa 8 parameter air yaitu; pH, TSS, TDS, DHL, Sulfat, DO, BOD dan Klorida.

Yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

- Pelayanan perizinan lingkungan dan perizinan LB3/Medis
  - Kualitas dan kuantitas yang belum memadai.
  - Tenaga PPLHD masih terbatas
  - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait.
  - Adanya musibah bencana alam.
- Pelayanan kebersihan dan persampahan
  - Jumlah tenaga kebersihan yang ada belum dapat mencakupi sebelas kecamatan karena hanya dikelola oleh satu UPTD yang berpusat di ibukota kabupaten.
  - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan.
  - Pengadaan Sarana dan prasarana persampahan sejak tahun 2021 menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pelayanan Laboratorium Lingkungan
  - Laboratorium lingkungan hanya dapat memeriksa 8 parameter kualitas air permukaan dan air limbah sehingga kedepannya masih dibutuhkan pengembangan parameter lainnya termasuk parameter kualitas udara dan parameter kualitas tanah.
  - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup.

b. Faktor Pendorong :

- Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Dukungan kebijakan pusat dalam penyelenggaraan dan pembangunan dibidang lingkungan hidup.
- Dukungan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merespon kebijakan pusat dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang lingkungan hidup
- Kemajuan IPTEK dibidang penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan serta tantangan pembangunan, isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten

Luwu Timur dalam RPJMD Tahun 2016-2021 akan menjadi isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan RENJA Perubahan dengan kebutuhan tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
					(Rp. )					(Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>3,491,311,414</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>3,693,423,387</b>
	<b>Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>52,201,000</b>	<b>Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>73,841,000</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	30,255,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	38,145,000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,778,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,778,000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,298,000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,298,000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	15,870,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	29,620,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang termanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>2,993,378,996</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang termanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>2,838,016,366</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	27 Orang	2,946,278,996	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	25 Orang	2,771,796,366
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	47,100,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	66,220,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan</b>	<b>100%</b>	<b>18,855,675</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan</b>	<b>100%</b>	<b>18,855,675</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	18,855,675	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	18,855,675
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>45,806,540</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>45,806,540</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Dokumen	14,206,540	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Dokumen	14,206,540
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	31,600,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	31,600,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>176,947,315</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>303,081,918</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	3,750,518
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	3,268,000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	3,268,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	5 Jenis	4,349,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	5 Jenis	4,349,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	3,600,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	3,600,000
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	418 Orang	8,820,000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	418 Orang	18,810,000
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	203 kali	155,562,000	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	203 kali	269,304,400
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>138,813,288</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>140,013,288</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,473,520	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,473,520
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	53,400,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>65,308,600</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>273,808,600</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	8,000,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	11,208,600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	219,708,600
	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>193,082,115</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>186,458,315</b>
	<b>Pnyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Yang dihasilkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>193,082,115</b>	<b>Pnyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Yang dihasilkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>186,458,315</b>
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	193,082,115	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	186,458,315

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan</b>	<b>1%</b>	<b>549,663,768</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan</b>	<b>1%</b>	<b>593,944,385</b>
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen lingkungan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>509,665,768</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen lingkungan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>532,162,523</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut		Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	86,570,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut		Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	86,000,000
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	423,095,768	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	446,162,523
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>		<b>Luas lahan yang direhabilitasi</b>	<b>37 Ha</b>	<b>39,998,000</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>		<b>Luas lahan yang direhabilitasi</b>	<b>37 Ha</b>	<b>61,781,862</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	39,998,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	61,781,862
	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>		<b>Persentase RTH yang tertangani dengan baik</b>	<b>5 RTH</b>	<b>62,683,320</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>		<b>Persentase RTH yang tertangani dengan baik</b>	<b>5 RTH</b>	<b>182,336,520</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah RTH yang dipelihara</b>	<b>5 RTH</b>	<b>62,683,320</b>	<b>Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah RTH yang dipelihara</b>	<b>5 RTH</b>	<b>182,336,520</b>
	Pengelolaan ruang terbuka hijau		Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	62,683,320	Pengelolaan ruang terbuka hijau		Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	182,336,520
	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>		<b>Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi</b>	<b>100%</b>	<b>23,350,000</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>		<b>Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi</b>	<b>100%</b>	<b>36,570,000</b>
	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>		<b>Usaha yang taat pengelolaan limbah B3</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>23,350,000</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>		<b>Usaha yang taat pengelolaan limbah B3</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>36,570,000</b>
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	23,350,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	36,570,000
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		<b>Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>71,414,000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		<b>Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan</b>	<b>73%</b>	<b>93,757,410</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota</b>		<b>Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan</b>	<b>22 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>71,414,000</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota</b>		<b>Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan</b>	<b>22 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>93,757,410</b>
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,200,000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	22,000,000
	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,130,000	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	36,673,410
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,084,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,084,000
	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>		<b>Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional</b>	<b>3 MHA</b>	<b>15,296,590</b>	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>		<b>Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional</b>	<b>3 MHA</b>	<b>15,296,590</b>

*Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022*

	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>		<b>Jumlah MHA yang terdata</b>	<b>2 MHA</b>	<b>15,296,590</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>		<b>Jumlah MHA yang terdata</b>	<b>2 MHA</b>	<b>15,296,590</b>
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	15,296,590	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	15,296,590
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>		<b>Persentase penghargaan lingkungan yang diterima</b>	<b>100%</b>	<b>11,827,431</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>		<b>Persentase penghargaan lingkungan yang diterima</b>	<b>100%</b>	<b>32,767,431</b>
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Penghargaan yang diberikan</b>	<b>1 Penghargaan</b>	<b>11,827,431</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Penghargaan yang diberikan</b>	<b>2 Penghargaan</b>	<b>32,767,431</b>
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah penghargaan yang diberikan	1 Penghargaan	11,827,431	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah penghargaan yang diberikan	2 Penghargaan	32,767,431

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan</b>		<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>50%</b>	<b>10,340,000</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan</b>		<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>10,340,000</b>
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>2 Masalah</b>	<b>10,340,000</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>2 Masalah</b>	<b>10,340,000</b>
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,340,000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,340,000
	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>		<b>Persentase jumlah sampah yang tertangani</b>	<b>70%</b>	<b>3,443,347,200</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>		<b>Persentase jumlah sampah yang tertangani</b>	<b>70%</b>	<b>3,622,934,800</b>
	<b>Pengelolaan sampah</b>		<b>Persentase sampah yang dikelola</b>	<b>70%</b>	<b>3,443,347,200</b>	<b>Pengelolaan sampah</b>		<b>Persentase sampah yang dikelola</b>	<b>70%</b>	<b>3,622,934,800</b>
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		Jumlah sampah yang ditangani	21.5	3,304,447,200	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		Jumlah sampah yang ditangani	21.5	3,468,594,800

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	115,730,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	115,730,000
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	23,170,000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	38,610,000
	<b>Total</b>				<b>7,872,315,838</b>	<b>Total</b>				<b>8,467,828,838</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tahapan Penyusunan RENJA perangkat daerah 2022 mengakomodir program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi dinas lingkungan hidup.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dengan tema *“Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yng berkualitas”*.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan pembangunan wilayah;
4. Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci terukur dan dapat dicapai.

Visi Misi Kab Luwu Timur Tahun 2021 s/d 2026 adalah:

**Visi : “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.**

Misi Kabupaten Luwu Timur yang menyangkut Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup, adalah Misi 3:

**Misi : “Tersedianya Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas”.**

Dengan misi ini dimaksudkan agar infrastruktur daerah dalam berbagai sektor mengalami perkembangan yang lebih memadai dihadapan terakses sampai pada daerah terisolasi. Disamping juga tercipta kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya volume dan kualitas jalan/jembatan, meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan di sektor pertanian, perindustrian, jasa, pariwisata, dan telekomunikasi, serta meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumberdaya air.

Selain itu, juga ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang berkualitas dan responsif bencana berupa pengendalian sumberdaya hutan, sungai dan wilayah pesisir, serta tertata dan bersihnya wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan, tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat, dan area public (*public space*).

Arah Kebijakan Misi 3 : Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas dengan arah kebijakan:

- Meningkatkan Kebersihan kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Adapun Program Prioritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup;

- a. Lingkungan dan tata ruang ; Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Sosial Budaya ; Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA.

Sesuai visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, maka tujuan pelaksanaan RENJA adalah “Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

**TABEL 04**

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja Sasaran Tahun 2022</b>
Misi 3 : Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	IKLHD	Point	87.55
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja Sasaran Tahun 2022</b>
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air , Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas air	Point	27.50
		Indeks Kualitas udara	Point	29.55
		Indeks tutupan Lahan	Point	30.50
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	60.56

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

**SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022**

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
	Pengelolaan ruang terbuka hijau
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Penyimpanan sementara Limbah B3
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH
	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan
	Program Pengelolaan Persampahan
	Pengelolaan sampah
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 10 program 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.467.828.838,- dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

No	Rancangan Awal RKP					Rencana Tahun 2022 (N)					Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023 (N)	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,491,311,414	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,493,417,797		100%	4,594,164,864
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	52,201,000	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	73,841,000		100%	92,500,000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	30,255,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	38,145,000		3 Dokumen	55,000,000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,778,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,778,000		2 Dokumen	6,000,000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,298,000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,298,000		2 Dokumen	1,500,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15,870,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	29,620,000		10 Dokumen	30,000,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,993,378,996</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,837,210,776</b>		<b>100%</b>	<b>3,765,464,864</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	27 Orang	2,946,278,996	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 Orang	2,771,790,776		26 Orang	3,712,050,728
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	47,100,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	65,420,000		18 Dokumen	53,414,136
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>18,855,675</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>18,855,675</b>		<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	18,855,675	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	18,855,675		4 Dokumen	25,000,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>45,806,540</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegwaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>45,806,540</b>		<b>100%</b>	<b>92,000,000</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Klengkapannya	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	48 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Klengkapannya	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	48 Orang	-		48 Orang	60,000,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Dokumen	14,206,540	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Dokumen	14,206,540		12 Dokumen	22,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-		2 Orang	30,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	31,600,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	31,600,000		4 Orang	40,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>176,947,315</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>303,881,918</b>		<b>100%</b>	<b>286,500,000</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	3,750,518		3 Jenis	1,500,000
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	3,268,000	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	3,268,000		12 Jenis	5,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	4,349,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	4,349,000		5 Jenis	3,500,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	3,600,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	3,600,000		1440 Eksampler	5,000,000
	Fasilitasi kunjungan tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 Orang	8,820,000	Fasilitasi kunjungan tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	418 Orang	18,810,000		196 Orang	9,000,000
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	171 Kali	155,562,000	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	203 Kali	270,104,400		171 Kali	262,500,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	-		2 Unit	60,000,000
	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	-	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	-		12 Unit	50,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	-		2 Unit	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>138,813,288</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>140,013,288</b>		<b>100%</b>	<b>142,700,000</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,473,520	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,473,520		1000 Surat	2,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768		36 Rekening	88,500,000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	53,400,000		4 Orang	52,200,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>65,308,600</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>73,808,600</b>		<b>100%</b>	<b>80,000,000</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000		8 Unit	47,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	8,000,000		32 Unit	13,000,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	11,208,600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	19,708,600		2 Unit	20,000,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>193,082,115</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>193,082,115</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>193,082,115</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>193,082,115</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	193,082,115	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	193,082,115		2 Dokumen	-
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	-	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	-		2 Dokumen	-
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>SKPD</b>	<b>Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>1%</b>	<b>549,663,768</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>SKPD</b>	<b>Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>1%</b>	<b>547,557,385</b>		<b>1%</b>	<b>520,535,493</b>
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>509,665,768</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>509,095,523</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>456,333,195</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	SKPD	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	86,570,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	SKPD	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	86,000,000		4 Dokumen	139,339,195

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	423,095,768	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	423,095,523		176 Laporan	316,994,000
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	<b>Luas lahan yang direhabilitasi</b>	<b>37 Ha</b>	<b>39,998,000</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	<b>Luas lahan yang direhabilitasi</b>	<b>37 Ha</b>	<b>38,461,862</b>		<b>37 Ha</b>	<b>64,202,298</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	39,998,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	38,461,862		37 Ha	64,202,298
	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	SKPD	<b>Terciptanya ruang terbuka hijau</b>	<b>5 RTH</b>	<b>62,683,320</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	SKPD	<b>Terciptanya ruang terbuka hijau</b>	<b>5 RTH</b>	<b>58,213,320</b>		<b>5 RTH</b>	<b>225,000,000</b>
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	<b>Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>62,683,320</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	<b>Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>58,213,320</b>		<b>0 Dokumen</b>	<b>225,000,000</b>
	Pengelolaan ruang terbuka hijau	SKPD	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	62,683,320	Pengelolaan ruang terbuka hijau	SKPD	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	58,213,320		5 RTH	225,000,000
	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	SKPD	<b>Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>23,350,000</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	SKPD	<b>Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>21,550,000</b>		<b>30 Usaha</b>	<b>63,000,000</b>
	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	SKPD	<b>Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>23,350,000</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	SKPD	<b>Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi</b>	<b>30 Usaha</b>	<b>21,550,000</b>		<b>30 Usaha</b>	<b>63,000,000</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	23,350,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	21,550,000		30 Usaha	63,000,000
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	SKPD	<b>Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>71,414,000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	SKPD	<b>Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>71,414,000</b>		<b>50%</b>	<b>73,500,000</b>
	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota</b>	SKPD	<b>Persentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi</b>	<b>22 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>71,414,000</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota</b>	SKPD	<b>Persentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi</b>	<b>22 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>71,414,000</b>		<b>22 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>73,500,000</b>
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,200,000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,200,000		10 usaha/ Kegiatan	16,500,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	<b>SKPD</b>	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,130,000	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	<b>SKPD</b>	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,130,000		30 Usaha/ Kegiatan	21,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	<b>SKPD</b>	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,084,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	<b>SKPD</b>	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,084,000		2 Usaha/ Kegiatan	36,000,000
	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>SKPD</b>	<b>Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional</b>	<b>3 MHA</b>	<b>15,296,590</b>	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>SKPD</b>	<b>Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional</b>	<b>3 MHA</b>	<b>15,296,590</b>		<b>3 MHA</b>	<b>100,000,000</b>
	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah MHA yang terdata</b>	<b>16 MHA</b>	<b>15,296,590</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>SKPD</b>	<b>Jumlah MHA yang terdata</b>	<b>16 MHA</b>	<b>15,296,590</b>		<b>16 MHA</b>	<b>100,000,000</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	15,296,590	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	15,296,590		3 MHA	100,000,000
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	SKPD	Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	11,827,431	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	SKPD	Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	11,827,431		1 Penghargaan	55,000,000
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	11,827,431	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	11,827,431		1 Penghargaan	55,000,000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	11,827,431	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	11,827,431		1 Penghargaan	55,000,000

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	<b>Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>50%</b>	<b>10,340,000</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>50%</b>	<b>10,340,000</b>		<b>50%</b>	<b>12,000,000</b>
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>2 Masalah</b>	<b>10,340,000</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan</b>	<b>2 Masalah</b>	<b>10,340,000</b>		<b>2 Masalah</b>	<b>12,000,000</b>
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	<b>SKPD</b>	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,340,000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	<b>SKPD</b>	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,340,000		2 Masalah	12,000,000
	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>SKPD</b>	<b>Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>80%</b>	<b>3,443,347,200</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>SKPD</b>	<b>Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>80%</b>	<b>3,449,617,200</b>		<b>80%</b>	<b>4,430,000,000</b>
	<b>Pengelolaan sampah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase sampah yang terkelola</b>	<b>80%</b>	<b>3,443,347,200</b>	<b>Pengelolaan sampah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Persentase sampah yang terkelola</b>	<b>80%</b>	<b>3,449,617,200</b>		<b>80%</b>	<b>4,430,000,000</b>

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	<b>SKPD</b>	Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,304,447,200	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	<b>SKPD</b>	Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,304,087,200		129 Orang	4,080,000,000
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	<b>SKPD</b>	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	115,730,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	<b>SKPD</b>	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	115,730,000		13 Jenis	130,000,000
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<b>SKPD</b>	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	23,170,000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<b>SKPD</b>	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	29,800,000		127 Bank Sampah	220,000,000

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup direncanakan melaksanakan 10 program, 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 8.467.828.838,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan RENJA Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL T-C.34**

**ALOKASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 3,693,423,387</b>	<b>PAD</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 73,841,000</b>	<b>PAD</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 38,145,000	PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 4,778,000	PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 1,298,000	PAD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 29,620,000	PAD
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2,838,016,366</b>	<b>PAD</b>
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	Rp 2,771,796,366	PAD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	Rp 66,220,000	PAD
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 18,855,675</b>	<b>PAD</b>
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	Rp 18,855,675	PAD

## Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>45,806,540</b>	<b>PAD</b>
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Rp	14,206,540	PAD
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	4 orang	Rp	31,600,000	PAD
5	<b>Admnistrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>303,081,918</b>	<b>PAD</b>
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Rp	3,750,518	PAD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Jenis	Rp	3,268,000	PAD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	Rp	4,349,000	PAD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1440 Eksampler	Rp	3,600,000	PAD
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	418 Orang	Rp	18,810,000	PAD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203 Kali	Rp	269,304,400	PAD
6	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>140,013,288</b>	<b>PAD</b>
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	Rp	1,473,520	PAD
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	Rp	85,139,768	PAD
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang	Rp	53,400,000	PAD
7	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>273,808,600</b>	<b>PAD</b>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	8 Unit	Rp	46,100,000	PAD
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	Rp	8,000,000	PAD
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp	219,708,600	PAD

2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>186,458,315</b>	<b>PAD</b>
8	<b>Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>186,458,315</b>	<b>PAD</b>
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2 dokumen	Rp	186,458,315	PAD
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA</b>	<b>1%</b>	<b>Rp</b>	<b>593,944,385</b>	<b>PAD</b>
9	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota</b>	<b>1%</b>	<b>Rp</b>	<b>532,162,523</b>	<b>PAD</b>
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	4 dokumen	Rp	86,000,000	PAD
24	Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten	176 laporan	Rp	446,162,523	PAD
10	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota</b>	<b>37 Ha</b>	<b>Rp</b>	<b>61,781,862</b>	<b>PAD</b>
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	37 Ha	Rp	61,781,862	PAD
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>182,336,520</b>	<b>PAD</b>
11	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>182,336,520</b>	<b>PAD</b>
26	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	5 RTH	Rp	182,336,520	PAD
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>36,570,000</b>	<b>PAD</b>
12	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>30 usaha</b>	<b>Rp</b>	<b>36,570,000</b>	<b>PAD</b>
27	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30 Usaha	Rp	36,570,000	PAD
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>93,757,410</b>	<b>PAD</b>
13	<b>Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkann oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22 usaha/kegiatan</b>	<b>Rp</b>	<b>93,757,410</b>	<b>PAD</b>

28	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10 usaha/ Kegiatan	Rp	22,000,000	PAD
29	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Usaha/ Kegiatan	Rp	36,673,410	PAD
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	2 Usaha/ Kegiatan	Rp	35,084,000	PAD
7	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>3 MHA</b>	<b>Rp</b>	<b>15,296,590</b>	<b>PAD</b>
14	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA tang Terkait dengan PPLH</b>	<b>2 MHA</b>	<b>Rp</b>	<b>15,296,590</b>	<b>PAD</b>
31	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3 MHA	Rp	15,296,590	PAD
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>32,767,431</b>	<b>PAD</b>
15	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 penghargaan</b>	<b>Rp</b>	<b>32,767,431</b>	<b>PAD</b>
32	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Penghargaan	Rp	32,767,431	PAD
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>10,340,000</b>	<b>PAD</b>
16	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>2 masalah</b>	<b>Rp</b>	<b>10,340,000</b>	<b>PAD</b>
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2 Masalah	Rp	10,340,000	PAD
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>70%</b>	<b>Rp</b>	<b>3,622,934,800</b>	<b>PAD</b>
17	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>70%</b>	<b>Rp</b>	<b>3,622,934,800</b>	<b>PAD</b>
34	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21.500 ton	Rp	3,468,594,800	PAD

## *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022*

---

---

35	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	13 Jenis	Rp	115,730,000	PAD
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	127 Bank Sampah	Rp	38,610,000	PAD
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>8,467,828,838</b>	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 telah berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dimana RENJA Tahun 2022 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.

Dengan adanya RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur diharapkan agar seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan tak kalah pentingnya tetap berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata semoga RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19650406 198603 1 017

